

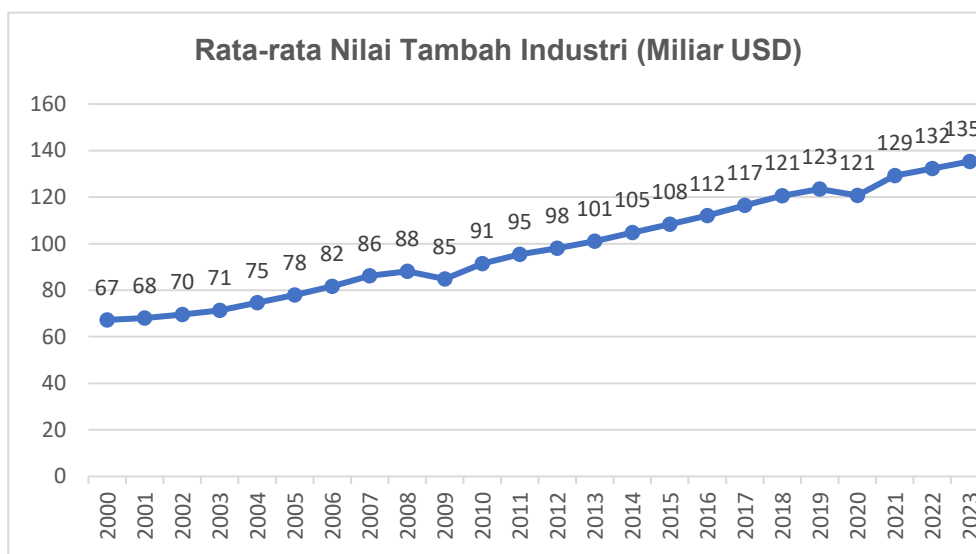
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian global yang berkontribusi besar terhadap penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Dalam konteks perekonomian modern yang semakin terintegrasi, sektor industri tidak hanya berperan sebagai mesin produksi, tetapi juga menjadi fondasi transformasi struktural yang memungkinkan suatu negara beralih dari struktur ekonomi berbasis sektor primer menuju perekonomian yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Seiring dengan meningkatnya integrasi rantai pasok global dan ekspansi perdagangan internasional, sektor industri semakin membuktikan perannya sebagai penggerak utama kemajuan ekonomi di tingkat dunia (UNIDO, 2023). Besarnya peran ini menjadikan kinerja sektor industri sebagai salah satu cerminan paling penting dari kondisi makroekonomi suatu negara secara keseluruhan.

Berdasarkan data World Bank (2024), nilai tambah sektor industri global menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2000–2023, di mana rata-rata nilai tambah meningkat dari 67,25 miliar USD pada tahun 2000 menjadi 135,33 miliar USD pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan laporan UNIDO (2023) yang mencatat pertumbuhan sektor industri global meningkat sebesar 2,3% pada tahun 2023. Meskipun demikian, tren positif ini sempat terganggu pada beberapa titik, khususnya pada tahun 2009 dan 2020 akibat krisis keuangan global dan pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas produksi dan investasi secara bersamaan.



Gambar 1. 1 Nilai Tambah Sektor Industri Tahun 2000–2023

Sumber: World bank, 2026 (diolah)

Berdasarkan data worldbank rata rata nilai sektor industri bisa dilihat dari Gambar 1.1, nilai tambah sektor industri global yaitu menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2000 hingga 2023. Nilai tambah sektor industri global menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2000 hingga 2023. Namun beberapa tahun seperti 2009 dan 2020 mengalami penurunan signifikan, mencerminkan dampak krisis keuangan global dan pandemi covid-19 yang menekan aktivitas produksi dan investasi sektor industri secara bersamaan. Pada tahun 2009, nilai tambah industri turun dari 88,18 miliar USD menjadi 84,84 miliar USD, sementara pada tahun 2020 kembali berkontraksi dari 123,47 miliar USD menjadi 120,78 miliar USD. Meskipun pada kedua periode tersebut sektor industri berhasil pulih kembali, penurunan tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor industri sangat rentan terhadap guncangan eksternal dan tidak selalu berjalan mulus di semua negara. Peningkatan nilai tambah industri secara global itu sendiri ternyata tidak terjadi secara merata,

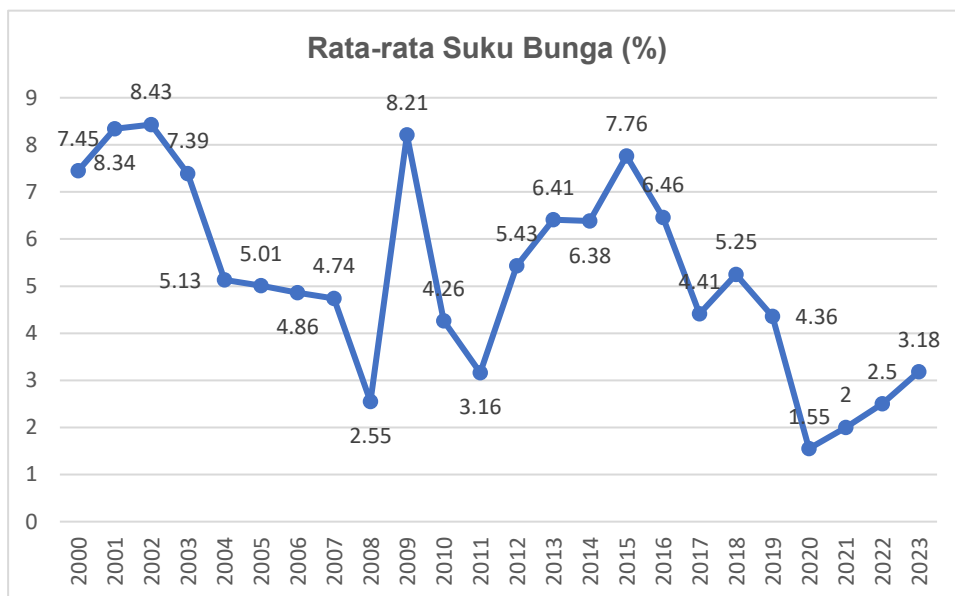
melainkan menunjukkan pola kontribusi yang sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang.

Jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan kelompok negara, kontribusi sektor industri terhadap PDB mencerminkan seberapa besar peran struktural industri dalam perekonomian masing-masing kelompok negara, yang hasilnya jauh lebih beragam dibandingkan gambaran rata rata pertahunnya (World Bank, 2024). Pada Negara maju *high income countries* seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, dan Prancis menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap PDB yang cenderung menurun secara perlahan selama periode 2000–2023. Pada tahun 2000, rata-rata kontribusi industri kelompok negara maju tercatat sekitar 26,53% dari PDB, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai sekitar 22,18% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan pergeseran struktural di mana perekonomian negara maju semakin didominasi oleh sektor jasa dan ekonomi berbasis pengetahuan, meskipun negara-negara maju tetap unggul dalam hal produktivitas industri, inovasi teknologi, dan nilai tambah per unit produksi (World Bank, 2024).

Sementara itu, Negara berkembang *middle income countries* seperti China, India, Indonesia, Brazil, dan Vietnam justru menunjukkan pola yang berlawanan. Kontribusi sektor industri terhadap PDB kelompok ini tercatat sebesar 33,86% pada tahun 2000 dan tetap bertahan kuat di kisaran 32–37% sepanjang periode 2000–2023, dengan angka terakhir sebesar 32,88% pada tahun 2023. Tingginya kontribusi ini mencerminkan proses industrialisasi yang masif terutama di kawasan Asia, di mana China telah bertransformasi menjadi pusat manufaktur terbesar di dunia, sementara India, Indonesia, dan Vietnam terus memperluas kapasitas industri mereka sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang (UNIDO, 2023).

Perbedaan pola kontribusi antara negara maju dan negara berkembang ini pada dasarnya mencerminkan perbedaan dalam kemampuan masing-masing kelompok negara untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Negara yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro, khususnya melalui pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, terbukti mampu mendorong investasi, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan daya saing sektor industri secara berkelanjutan (Bernanke & Gertler, 1995). Sebaliknya, ketidakstabilan kebijakan moneter seperti lonjakan suku bunga, maupun kebijakan fiskal yang tidak terarah seperti defisit pengeluaran pemerintah dan tekanan pajak yang tinggi, dapat menghambat pertumbuhan sektor industri bahkan di negara yang memiliki sumber daya melimpah sekalipun (Auerbach & Gorodnichenko, 2012). Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap kinerja sektor industri menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Salah satu instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh terhadap kinerja sektor industri adalah suku bunga. Perubahan suku bunga secara langsung memengaruhi biaya modal dan keputusan investasi perusahaan industri, sehingga dinamikanya perlu dipahami secara mendalam sebagai bagian dari analisis kebijakan makroekonomi global (Taylor, 1993). Dinamika suku bunga perlu dipahami secara mendalam sebagai bagian penting dari analisis kebijakan makroekonomi global, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan.

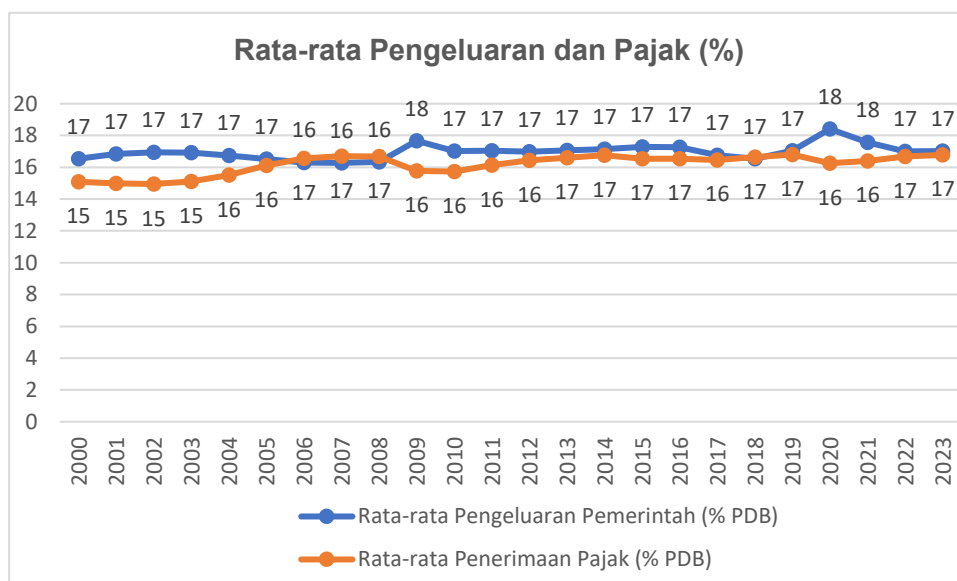


Gambar 1. 2 Rata-rata Suku Bunga(%) 2000-2023

Sumber: World bank, 2026(diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 Rata-rata suku bunga global menunjukkan tren penurunan jangka panjang sepanjang periode 2000 hingga 2023. Beberapa tahun seperti 2001–2002 dan 2009 mengalami lonjakan signifikan, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat resesi dan krisis keuangan global. Pada tahun 2009, rata-rata suku bunga global melonjak ke level tertinggi sebesar 8,21%, sebagai respons kebijakan moneter kontraktif terhadap gejolak pasar keuangan. Lonjakan suku bunga tersebut berdampak pada meningkatnya biaya modal, menurunnya investasi, dan tertekannya kinerja sektor industri di berbagai negara (Taylor, 1993). Sementara pada tahun 2020 dan 2021 rata-rata suku bunga mencapai rendah, yaitu masing-masing sebesar 1.55% dan 2%, mencerminkan kebijakan suku bunga ekspansif yang diterapkan sejumlah negara maju dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi (International Monetary Fund, 2020).

Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang tercermin dari pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak turut memengaruhi kinerja sektor industri (Barro, 1990). Pengeluaran pemerintah yang produktif dapat menciptakan efekmultiplier terhadap aktivitas industri, sedangkan struktur perpajakan yang efisien mampu mendorong investasi sektor swasta (Auerbach & Gorodnichenko, 2012).



Gambar 1. 3 Rata-rata Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak Global Tahun 2000–2023

Sumber: World bank, 2026 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.3 memperlihatkan dinamika pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak global yang kompleks. Beberapa tahun seperti 2009 dan 2020 mengalami lonjakan signifikan pada sisi pengeluaran pemerintah, mencerminkan meningkatnya kebutuhan stimulus fiskal akibat krisis keuangan global dan pandemi covid-19. Selanjutnya Pada tahun 2020, rata-rata pengeluaran pemerintah melonjak ke level tertinggi sebesar 18,41% dari PDB, sementara penerimaan pajak justru mengalami penurunan menjadi 16,25% akibat kontraksi aktivitas ekonomi yang menekan basis pajak. Tren ini mengindikasikan bahwa

kebijakan fiskal bersifat countercyclical, di mana pemerintah cenderung meningkatkan belanja di saat ekonomi melambat guna menopang permintaan agregat dan kinerja sektor industri (Guerguil & Tapsoba, 2023). Lonjakan pengeluaran tersebut berdampak pada perluasan defisit fiskal di berbagai negara, namun sekaligus memberikan stimulus yang dibutuhkan sektor industri untuk bertahan dan pulih dari tekanan eksternal (Blanchard et al., 2010).

Sejumlah literatur telah dikembangkan oleh akademisi dan peneliti untuk mengkaji pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap kinerja sektor industri. Adanya perubahan dinamika kebijakan makroekonomi dalam beberapa dekade terakhir kemungkinan akan sangat berdampak pada pertumbuhan dan daya saing sektor industri di berbagai negara. Temuan tersebut didukung beberapa studi empiris lain yang menemukan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga dan kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah serta penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor industri karena memengaruhi biaya modal, permintaan agregat, dan daya saing industri secara bersamaan (Bernanke & Gertler, 1995). Sedangkan menurut Caceres & Malacrino (2023), efektivitas kebijakan moneter dan fiskal terhadap sektor industri tidak seragam di semua negara karena sangat bergantung pada kondisi struktural, tingkat kedalaman pasar keuangan, dan kapasitas fiskal masing-masing negara.

Beberapa penelitian terdahulu membahas topik yang sama, tetapi masih ada aspek yang diabaikan dari beberapa studi tersebut. Bernanke & Gertler (1995) dan Taylor (1995) meneliti pengaruh kebijakan moneter terhadap investasi dan output industri, namun analisisnya masih terbatas pada konteks negara maju, sehingga hasilnya belum tentu berlaku secara global di negara berkembang. Christiano et al (2011) membahas stimulus fiskal dan kebijakan moneter ekspansif dalam lingkup makroekonomi, tetapi hanya berfokus pada dampak terhadap

output agregat tanpa memisahkan secara spesifik kontribusi sektor industri. Sementara Auerbach & Gorodnichenko, (2012) menyoroti dampak stimulus fiskal terhadap output industri, tetapi tidak mengintegrasikan secara simultan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal dalam satu kerangka analisis lintas negara. Dedola & Lippi (2005) berfokus pada heterogenitas respons sektor industri terhadap shock kebijakan moneter, tetapi kurang mengeksplorasi peran kebijakan fiskal sebagai instrumen komplementer dalam mendorong kinerja industri.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi dan dikembangkan. Sejauh ini, penelitian terdahulu mayoritas masih berfokus pada analisis instrumen kebijakan secara terpisah, baik hanya sisi moneter maupun hanya sisi fiskal, sehingga belum mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak kombinasi kebijakan tersebut terhadap sektor industri dalam skala global. Selain itu, cakupan negara yang digunakan dalam studi terdahulu masih terbatas, sehingga generalisasi temuan menjadi kurang representatif. Penelitian ini berupaya menyempurnakan hal tersebut dengan mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal secara simultan dalam satu kerangka analisis yang mencakup 146 negara selama periode 2000–2023.

Lebih lanjut, meskipun beberapa studi telah mencoba menganalisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap industri, indikator yang digunakan umumnya masih bersifat agregat dan tidak membedakan karakteristik negara maju dan berkembang secara eksplisit. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan memasukkan variabel kontrol seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan keterbukaan perdagangan yang mencerminkan kondisi struktural masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam menganalisis sejauh mana koordinasi

kebijakan moneter dan fiskal mampu mendorong kinerja sektor industri secara efektif di berbagai negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh pengaruh kebijakan moneter yang diproksikan melalui suku bunga dan kebijakan fiskal yang diproksikan melalui pengeluaran pemerintah serta penerimaan pajak terhadap nilai tambah sektor industri dalam lingkup global. Untuk mengatasi keterbatasan studi terdahulu, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan menggunakan data panel 146 negara selama 24 tahun (2000–2023) serta mengintegrasikan kedua instrumen kebijakan secara simultan dalam satu model estimasi. Selain itu, penelitian ini secara khusus memasukkan variabel kontrol yang mencerminkan kondisi makroekonomi masing-masing negara guna menghasilkan estimasi yang lebih robust dan representatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme transmisi kebijakan makroekonomi terhadap sektor industri, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi bank sentral dan pemerintah dalam merumuskan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif demi mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkelanjutan di berbagai negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja sektor industri?
2. Kebijakan manakah yang lebih cepat memberikan dampak terhadap kinerja sektor industri, kebijakan moneter ataukah kebijakan fiskal?

3. Kebijakan manakah yang memberikan dampak lebih besar terhadap kinerja sektor industri, kebijakan moneter ataukah kebijakan fiskal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor industri.
2. Untuk mengidentifikasi kebijakan yang lebih cepat memberikan dampak terhadap kinerja sektor industri antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
3. Untuk menganalisis kebijakan yang memberikan dampak lebih besar terhadap kinerja sektor industri antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi makro dan ekonomi industri, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai efek interaksi kebijakan moneter dan fiskal terhadap sektor riil. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik pada isu-isu kebijakan makroekonomi dan dinamika sektor industri global.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan moneter dan fiskal yang optimal untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. Dengan memahami mekanisme transmisi kebijakan, pemerintah dan bank sentral dapat menyusun strategi koordinasi yang lebih efektif.
- b) Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah dalam kajian kebijakan makroekonomi dan ekonomi industri, khususnya terkait dengan penerapan kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks perekonomian global yang terintegrasi.
- c) Penelitian ini juga bermanfaat bagi pelaku industri dan investor dalam memahami dampak kebijakan makroekonomi terhadap prospek bisnis mereka, sehingga dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab, yaitu:

- 1. **Bab I: Pendahuluan**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2. **Bab II: Tinjauan Pustaka**, memuat teori-teori yang relevan mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan studi terdahulu yang mendukung penelitian ini.
- 3. **Bab III: Metodologi Penelitian**, menjelaskan pendekatan penelitian, spesifikasi model ekonometrika, variabel yang digunakan, sumber data, serta metode analisis data.

4. **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**, berisi pemaparan hasil analisis ekonometrika dan interpretasi temuan penelitian terhadap pengaruh kebijakan moneter dan fiskal pada sektor industri global.
5. **Bab V: Kesimpulan dan Saran**, berisi ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.